



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2016



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan	I-1
1.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Pasuruan	I-6
1.3. Potensi dan Pelayanan Permasalahan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan	I-7
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	II-7
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
BAB 4 PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	
Lampiran I : Matriks Renstra	
Lampiran II : Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Bappeda	I-8
Tabel 2.1.	Hasil Review Renstra Bappeda	II-2
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016	II-7
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	III-1
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2016	III-2
Tabel 3.3.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016	III-3
Tabel 3.4.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2016	III-4
Tabel 3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2016	III-5
Tabel 3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2016	III-6
Tabel 3.7.	Pagu dan Realisasi Anggaran	III-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda	I-5
Diagram 3.1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2015-2016	III-4
Diagram 3.2. Analisis sasaran 2 Tahun 2015-2016	III-5
Diagram 3.3. Analisis sasaran 3 Tahun 2015-2016	III-6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Bappeda	I-8
Tabel 2.1,	Hasil Review Renstra Bappeda	II-2
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016	II-7
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	III-1
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2016	III-2
Tabel 3.3.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016	III-3
Tabel 3.4.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2016	III-4
Tabel 3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2016	III-5
Tabel 3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2016	III-6
Tabel 3.7.	Pagu dan Realisasi Anggaran	III-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pedoman APBD;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD (20 tahun);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD (5 tahun);
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD (Tahunan);
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana teknisnya;
- d. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.1.1.1 Sekretariat

Tugas : melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.1.2 Bidang Data dan Statistik

Tugas : melaksanakan kegiatan di bidang penghimpunan data, pengendalian data, serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Fungsi :

- a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Data dan Statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pengumpulan dan menyusun data hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pengendalian data yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- e. Penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.1.3 Bidang Ekonomi

Tugas : melaksanakan kegiatan di bidang Perencanaan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja bidang ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Perencanaan umum pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan,
- c. Sinkronisasi, koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan,
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan,
- e. Perencanaan kerjasama pengembangan perekonomian daerah.
- f. Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.1.4 Bidang Sosial Budaya

Tugas melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Sosial Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan perencanaan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pemerintahan umum, kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi rencana pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pemerintahan umum, kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pemerintahan umum, kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.1.5 Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Tugas : melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan di bidang Fisik Sarana dan Prasarana.

Fungsi :

- a. Penyusunan konsep program kerja bidang Fisik Sarana dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanakan pembinaan di lingkup bidang fisik dan prasarana;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di lingkup bidang fisik dan prasarana;
- d. Perumusan kebijakan perencanaan atau perencanaan pembangunan skala makro / regional di lingkup bidang fisik dan prasarana;
- e. Pengawasan / pengendalian program pembangunan skala makro / regional di lingkup bidang fisik dan prasarana;
- f. Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

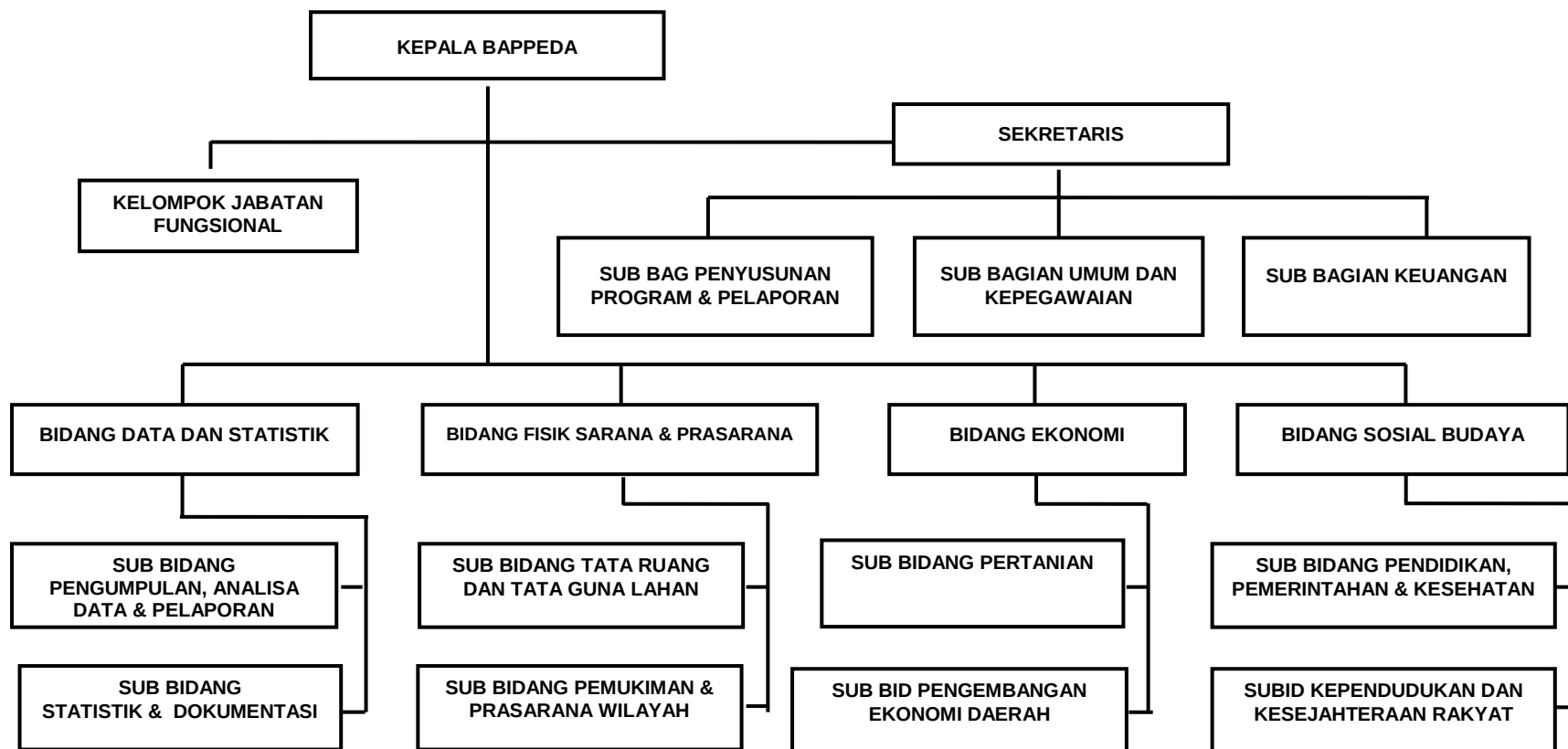
1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA. Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana gambar 1.1.

Gambar 1.1.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007)



1.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Pasuruan

1.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Susunan kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, dan eselon.

(1) Menurut golongan kepangkatan, dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV : 10 orang
- Golongan III : 26 orang
- Golongan II : 7 orang
- Golongan I : -
- Calon PNS : -
- Tenaga Honorer : 2 orang

(2) Menurut tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi :

- Pasca Sarjana : 13 orang
- Sarjana : 22 orang
- Diploma : -
- SMA : 10 orang
- SMP : -
- SD : -

(3) Menurut eselon dikelompokkan menjadi :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 15 orang

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja perkantoran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan antara lain:

- 1) BAPPEDA menempati gedung seluas 933 m² terletak di areal Komplek Perkantoran Pemkab. Pasuruan di Jl. Raya Raci – Bangil Km. 9 Raci, Bangil-Pasuruan.
- 2) Kendaraan dinas operasional sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut :
 - Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 7 unit
 - Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 20 unit

- 3) Peralatan penunjang kerja : laptop, personal computer, printer, telepon, jaringan internet dalam jumlah cukup dan kondisi baik.

Untuk menunjang kegiatan administratif didukung oleh fasilitas komputer dan peralatan elektronik lainnya. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran BAPPEDA Kabupaten Pasuruan.

1.3 Potensi dan Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan diukur melalui Indikator Kinerja Utama untuk mendukung sasaran strategis :

- 1) terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan ada beberapa indikator kinerja utama, yaitu :
 - a) Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
 - c) Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD;
 - d) Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah;
 - e) Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral;
- 2) serta untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah didukung indikator kinerja utama :
 - a) Ketaatan terhadap RTRW

penentuan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilakukan dengan asistensi langsung dari Kemenpan & RB.

Pelayanan Bappeda dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi yang diukur dengan indicator kinerja utama

Tabel 1.1.
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Bappeda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
	Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD
	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah
	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral
Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah	Ketaatan terhadap RTRW

Potensi pelayanan Bappeda dapat ditingkatkan dengan adanya kondisi sebagai berikut :

- Pengembangan sistem aplikasi perencanaan yang mendukung mekanisme perencanaan pembangunan daerah mulai dari musrenbang RKPD, penyusunan RKPD, hingga KUA-PPAS;
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek perencanaan;
- Penyediaan anjungan sistem informasi tata ruang berbasis web/online;
- Pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi berbasis web/online, sebagai sarana penyampaian laporan hasil pengendalian pelaksanaan program/kegiatan SKPD terhadap capaian kinerja dan alokasi anggaran setiap tribulan;
- Tersedianya sistem operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sedangkan permasalahan dalam pelayanan Bappeda dipengaruhi adanya kondisi berikut :

- Belum adanya sistem terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran;
- Belum adanya sistem peningkatan kinerja aparatur;

- Belum dilaksanakan review RPJMD 2013-2018 yang berkaitan dengan keselarasan terhadap RPJMN; hasil review IKU Pemda dan IKU organisasi perangkat daerah.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat pada lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah BAPPEDA Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu tahapan penting penyusunan dokumen Renstra. Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan pada akhir periode Renstra, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD, sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Hasil Review Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. PASURUAN
NOMOR : 050/14.a/SK/424.0072/2015
TANGGAL : 16 JANUARI 2015

HASIL REVIEW RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA KABUPATEN PASURUAN

VISI	Terwujudnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana yang Profesional, Inovatif, dan Akuntabel								
MISI I	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur perencana								
TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR		FORMULA	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR 2018
				2014	2015	2016	2017	2018	
TUJUAN : Meningkatkan profesionalisme lembaga dan aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis		$\frac{\text{Jumlah aparatur mengikuti diklat teknis dan bersertifikat th ybs}}{\text{Jumlah aparatur seluruhnya th ybs}} \times 100\%$	25%	30%	35%	40%	45%	45%
SASARAN : Terwujudnya lembaga dan aparatur perencana yang kompeten	1	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis	$\frac{\text{Jumlah aparatur mengikuti diklat teknis th ybs}}{\text{Jumlah aparatur seluruhnya th ybs}} \times 100\%$	25%	30%	35%	40%	45%	45%

MISI II								
Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang partisipatif dan								
TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR 2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
TUJUAN : Meningkatkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Aspirasi masyarakat adalah aspirasi yang disampaikan melalui musrenbang kabupaten.	10%	13%	15%	17%	20%	20%
		$\frac{\sum_i \text{jml usulan kegiatan musrenbang kab bidang (i) yg diakomodir RKPD th (n + 1)}}{\text{jml seluruh kegiatan dalam RKPD th (n + 1)}} \times 100\%$						
		Ket : n = tahun berjalan $\left\{ \begin{array}{l} 1 = \text{fispra} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{pemerintahan/data} \end{array} \right\}$						

SASARAN 1 : Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah							
	2	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD = $(Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4) / 4$	70%	71%	72%	73%	74%	74%
		- Ki1 = Keselarasan sasaran	$Ki1 = \frac{\text{Jumlah sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$						
		- Ki2 = Keselarasan indikator sasaran	$Ki2 = \frac{\text{Jumlah indikator sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah indikator sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$						
		- Ki3 = Keselarasan target sasaran	$Ki3 = \frac{\text{Jumlah target sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah target sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$						
		- Ki4 = Keselarasan Program	$Ki4 = \frac{\text{Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program pada RPJMD}} \times 100\%$						

	3	Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD	$\sum_i K_i \quad K_i = \frac{\sum_i K_{ij}}{3} \times 100\%$	-	95%	96%	97%	98%	98%
			$i = \text{nama bidang} \begin{cases} 1 = \text{fispra} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{data} \\ 5 = \text{sekretariat} \end{cases}$						
			$j = \text{subindikator} \begin{cases} 1 = \text{selaras prog} \\ 2 = \text{selaras IK prog} \\ 3 = \text{selaras target IK prog} \end{cases}$						
		- Ki1 = Keselarasan program	$Ki1 = \frac{\text{Jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah program pada RKPD}} \times 100\%$						
		- Ki2 = Keselarasan indikator program	$Ki1 = \frac{\text{Jumlah indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah indikator program pada RKPD}} \times 100\%$						
		- Ki3 = Keselarasan target program	$Ki1 = \frac{\text{Jumlah target program pada RKPD yang sesuai Renja}}{\text{Jumlah target program pada RKPD}} \times 100\%$						
	4	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah	$\frac{\sum_i \text{jml IK RPJMD bab 9 urusan bidang (i) yg mencapai target}}{\text{jml seluruh IKRPJMD bab 9 (= 168)}} \times 100\%$	86,30%	87,50%	89,98%	92,86%	95,83%	95,83%
			$i = \text{nama bidang} \begin{cases} 1 = \text{fispra} \\ 2 = \text{sodbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \\ 4 = \text{data} \end{cases}$						
	5	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/ sektoral	$\frac{\sum_i \text{jml rekomendasi kajian perencanaan bidang (i) 2014 sampai dg th (n-1) yg sesuai DPA SKPD 2014 sampai dg th (n)}}{\text{jml seluruh rekomendasi kajian 2014 sampai dg th (n-1)}} \times 100\%$		80%	85%	90%	95%	95%
			$i = \text{nama bidang} \begin{cases} 1 = \text{fispra} \\ 2 = \text{sosbud} \\ 3 = \text{ekonomi} \end{cases}$						

VISI	Terwujudnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana yang Profesional, Inovatif, dan Akuntabel								
MISI III	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah								
TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR		FORMULA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR 2018
				2014	2015	2016	2017	2018	
TUJUAN : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah secara terencana dan berkelanjutan	Ketaatan terhadap RTRW		Luas wilayah existing dibandingkan luas rencana peruntukan sesuai RTRW	20-25%	25-30%	30-35%	35-40%	40-45%	40-45%
SASARAN : Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah	1	Ketaatan terhadap RTRW	Luas wilayah pemanfaatan existing dibandingkan luas rencana peruntukan sesuai RTRW						
			Pemanfaatan lahan eksisting berdasarkan survey pemetaan yang dilakukan mulai tahun 2014						
	2	Persentase tersedianya rencana tata ruang rinci sesuai	Persentase rata-rata dokumen rencana tata ruang rinci yang disusun dan ditetapkan	49,50%	59,58%	69,17%	78,75%	95,00%	95,00%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan janji kinerja yang menetapkan target yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun , sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah	15%
		Keselaran antara RKPD dengan RPJMD	72%
		Keselaran antara Renja dengan RKPD	96%
		Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah	89,98%
		Kesesuaian aplikasi perencanaan pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral	85%
2	Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah.	Ketaatan terhadap RTRW	30%
		Tersedianya rencana tata ruang	69,17%

Secara lengkap dokumen perjanjian kinerja eselon II, III dan IV sebagaimana terlampir.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil pengukuran tersebut memberi gambaran tercapai/tidaknya target beserta penjelasan yang cukup memadai, sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasuruan di tahun 2016 dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1.1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	15	15,78	105,2
		1.2	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	72	89,50	124,3
		1.3	Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD	%	96	77	80
		1.4	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah	%	89,98	72,62	80,70
		1.5	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral	%	85	86,74	102,04
2	Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah	2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	30	79	263,3
		2.2	Tersedianya tata ruang	%	69,17	89,8	129,82

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda pada tahun 2016 mencapai target kecuali Persentase keselarasan renja terhadap RKPD yaitu sebesar 77 % dari target tahun 2016 sebesar 96 % atau tingkat capaian sebesar 80 %. Sedang untuk capaian indikator kinerja pemerintah daerah sebesar 72,62 % dari target tahun 2016 sebesar 89,98 %, atau tingkat capaiannya sebesar 80,70 %. Hal ini dikarenakan dari 168 indikator kinerja di RPJMD yang tercapai dan memenuhi target sebesar 122 indikator kinerja.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2016 Bappeda

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya lembaga dan aparatur perencana yang kompeten	1.1	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis	%	35	0	0
		1.2	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	%	72	90	125
2	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	2.1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	15	15,78	105,2
		2.2	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	72	89,50	124,3
		2.3	Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD	%	96	77	80
		2.4	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah	%	89,98	72,62	80,70
		2.5	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral	%	85	86,74	102,04
3	Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah	3.1	Persentase tersedianya rencana tata ruang rinci sesuai UU. 26 / 2007	%	69,17	89,8	129,82
		3.2	Ketaatan terhadap RTRW	%	15	15,78	105,2

Capaian indikator kinerja strategis tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari 8 indikator ada 2 indikator yang tidak mencapai target. Disamping persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah juga persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis, hal dikarenakan tingkat frekuensi kegiatan yang cukup padat serta terbatasnya jumlah personil sumberdaya aparatur.

Tabel 3.3.
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2016	2016	
			Realisasi	%
Sasaran 1	Terwujudnya lembaga dan aparatur perencana yang kompeten			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	0	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur	1.170.012.400	1.109.766.369	94,85
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.420.337.500	1.291.039.650	90,89
Total		2.650.349.900	2.400.806.019	90,58
Sasaran 2	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan			
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.170.640.600	2.011.446.695	92,66
5	Program Pengembangan Data/ Informasi	556.587.000	419.217.943	75,32
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.470.392.500	1.215.116.108	82,64
7	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.919.454.000	1.669.785.226	86,99
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	678.182.100	510.263.985	75,24
Total		6.795.256.200	5.825.829.957	85,73
Sasaran 3	Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah			
10	Program Perencanaan Tata Ruang	1.311.075.000	1.221.678.250	93,18
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.078.007.650	1.037.123.900	96,21
Total		2.389.082.650	2.258.802.150	94,55
TOTAL I + II +III		11.843.688.750	10.485.438.126	88,53

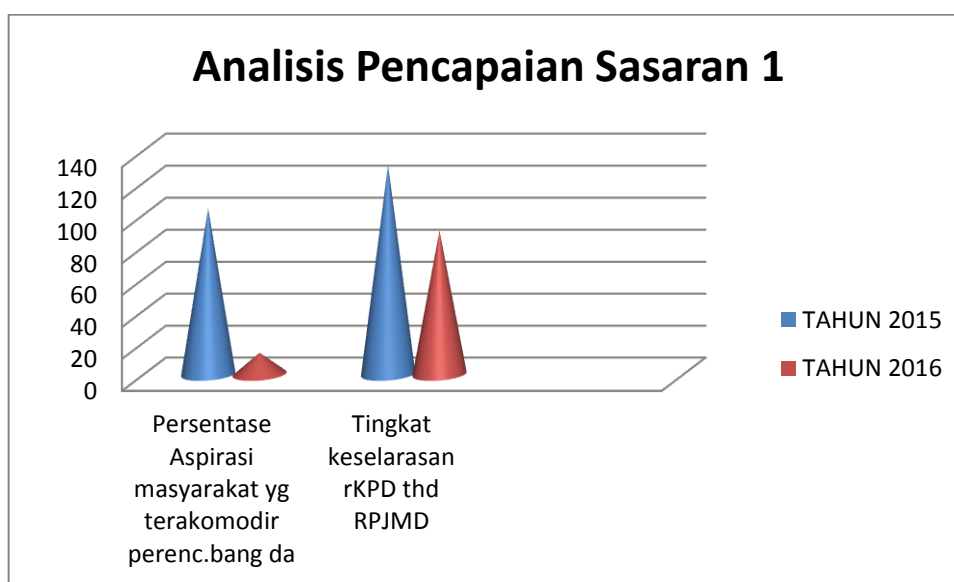
Pada Tabel 3.3. menjelaskan serapan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah tahun anggaran 2016 mencapai 75,32 % hal ini disebabkan pada kegiatan Penyusunan PDRB tidak dilaksanakan, karena

terbatasnya personil pada BPS serta semakin padatnya kegiatan BPS yang menuntut kinerja semua pegawai harus ditingkatkan. Sehingga yang dilakukan hanya kegiatan pendataan dan penyusunan tentang tingkat inflasi di Kabupaten Pasuruan. Tidak dilaksanakan kegiatan penyusunan PDRB ini berdasarkan Surat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan No : B-35140.0044/BPS/ 9280/ 02/ 2015 tanggal 18 Februari 2016, Perihal : Penawaran Kerja Sama tahun 2016 .Usulan Penangguhan Kerjasama Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB Kabupaten Pasuruan 2016, disebabkan adanya kegiatan nasional Sensus Ekonomi 2016 yang memerlukan waktu dan tenaga yang optimal .

Tabel 3.4.
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2016
Terwujudnya lembaga dan aparatur perencana yang kompeten

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis	%	30	22	73	35	0	0
2	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	%	72	98	136	72	90	125

Diagram 3.1.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Tahun 2015-2016



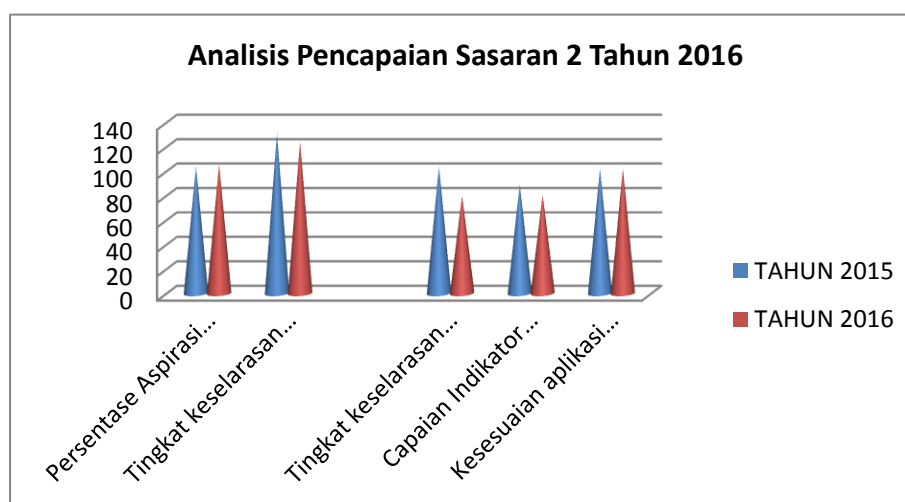
Pada diagram 3.1. Di jelaskan bahwa untuk capaian indikator persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis lebih baik pada tahun 2015 sebesar 73 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 0%, belum optimalnya

capaian pada indikator tersebut dikarenakan padatnya jadwal kegiatan dan terbatasnya jumlah sumberdaya yang ada. Demikian juga pada capaian indikator sarana prasarana dalam kondisi baik tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 masih lebih rendah. Namun tahun 2016 realisasi capaian sudah melampaui target .

Tabel 3.5.
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2016
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	13	13.5	104	15	15,78	105,2
2	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	71	93	131	72	89,50	124,3
3	Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD	%	95	100	104	96	77	80
4	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah	%	87,5	78	89	89,98	72,62	80,70
5	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang/sektoral	%	80	81.73	102	85	86,74	102,04

Diagram 3.2.
Analisis sasaran 2 Tahun 2016

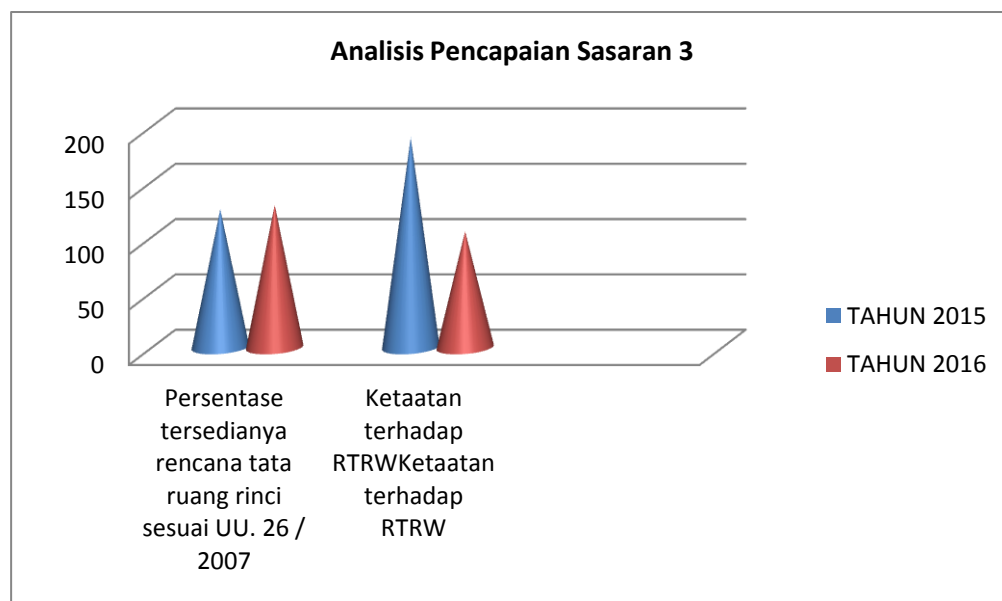


Pada diagram 3.2. terlihat bahwa hanya indikator persentase capaian indikator kinerja pemerintah pada tahun 2016 tidak mencapai target serta mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2015.

Tabel 3.6.
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2016
Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi
tingkat disparitas antar wilayah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase tersedianya rencana tata ruang rinci sesuai UU. 26 / 2007	%	59,58	79	125	69,17	89,8	129,82
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	30	57	190	15	15,78	105,2

Diagram 3.3
Analisis sasaran 3
Tahun 2015-2016



Pada diagram 3.3. terlihat capaian 2 indikator untuk sasaran 3 pada tahun 2015 dan 2016 capaiannya melebihi target

Tabel 3.7.
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016

No	Misi	Sasaran		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur perencana	1.1	Terwujudnya lembaga dan aparatur perencana yang kompeten	2.650.349.900	2.400.806.019	90,58
2	Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	2.1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aspiratif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan	6.795.256.200	5.825.829.957	85,73
3	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah	3.1	Terwujudnya perencanaan daerah yang mengurangi tingkat disparitas antar wilayah	2.389.082.650	2.258.802.15	94,55
JUMLAH				11.843.688.750	10.485.438.126	88,53

BAB 4

PENUTUP

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagian besar dapat dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan baik. Di tahun 2016 jumlah indikator pada Bappeda sebanyak 6 indikator yang ada dalam perjanjian kinerja. Sedang yang mencapai target sebanyak 4 indikator, bahkan melebihi target capaian, sedangkan pencapaian anggaran tahun 2016 sebesar 88,53%. Selanjutnya dalam rangka untuk memenuhi tuntutan capaian kinerja perlu adanya pengembangan inovasi yang terus menerus yang berkesinambungan dengan mengacu regulasi yang ada.

Guna untuk mengoptimalkan dan mendukung tugas pokok serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah salah satu diantaranya antara lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip prinsip perencanaan yang baik serta harus didukung adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan, juga tumbuhnya kemandirian bagi para pelaku dan personil perencana di Bappeda. Selain dari keberhasilan di atas juga terdapat permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan solusi yang konstruktif, diantaranya dengan peningkatan kompetensi personil yang memiliki kapasitas berkelanjutan.

Pasuruan, Februari 2017

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN**



Ir. BAMBANG ABIMANYU
Pembina Utama Muda
NIP. 19570917 198903 1 002